

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- As'ad Moh. 2002. *Psikologi Industri*. Yogyakarta : Liberty
- A. Wahab, S. 1990. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bina Aksara
- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hari Sabarno. 2007. *Mamandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika
- H.A.W. Widjaya, 2007, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Irawan Soejito, 1984, *Sejarah Daerah Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita
- Mahfud, Moh. 1988, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup
- Musanef, 2007, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Gunung Agung,
- Rivai, Veithzal dan Basri, Ahmad Fawzi Mohd. 2005. *Performance Appraisal*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta. Ghalia Indonesia
- Utang Rosidin, 2010, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*, Bandung, Pustaka Setia
- Wahab, S. A. 2002, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bina Aksara
- Warsito Utomo. 2005. *Anggaran Berbasis Kinerja-Konsep Dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada

Wibawa, S., 2002. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Edisi I. Cetakan I, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Widjaja, A.W. 2006, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali

### **Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Enditya Luhur Raharja, Lukman M Baga, A Faroby Falatehan. 2018. Strategi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah* Volume 10 Nomor 2, November 2018

Firman Talib, Daud M. Liando Maria H. Pratiknjo. 2019. Peran Kepala Dinas Dalam Meningkatkan Kinerja PNS Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol V Nomor 084 Universitas Sam Ratulangi Sept- Des 2019

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas.